

## ABSTRAK

### **Cintiya Rustianawati: “Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Majalengka”**

Latar belakang ketertarikan penulis terhadap rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Majalengka, yaitu dalam proses pengadaan tanahnya yang mengalami berbagai macam persoalan antara lain, nilai ganti rugi yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang digunakan, hingga sulitnya mencapai mufakat antara pemilik tanah dengan pemerintah pada saat menetapkan nilai ganti rugi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Majalengka, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian implementasi kebijakan, dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini mengacu kepada teori George C. Edward III yang mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi, wawancara dengan informan serta studi pustaka dari dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan tanah yang ada. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara mendalam dengan informan, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati Majalengka dinyatakan gagal, meskipun pemerintah telah melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan alur atau tahapan yang terdapat pada aturan yang berlaku. Hambatan dalam implementasi kebijakan pengadaan tanah tersebut berasal dari pemerintah yang kurang memperhatikan faktor eksternal (lingkungan di luar kebijakan) dalam pelaksanaannya, seperti pemerintah yang masih menganggap masyarakat sebagai objek bukan sebagai subyek pembangunan dan belum maksimalnya pemerintah dalam bersosialisasi dengan mengedepankan komunikasi yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah sejak awal, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung arah pembangunan pemerintah. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah baru sekedar pendekatan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang pada saat itu terjadi, dan belum bisa mengatasi hingga ke akar permasalahan sehingga upaya yang dilakukan dinilai belum maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Tanah**

## ABSTRACT

### ***Cintiya Rustianawati: "Implementation of Land Procurement for Development Policy Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in the district of Kertajati Majalengka"***

*Background interest the authors of the plan development Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in District Kertajati Majalengka in the process of procurement of land experiencing various problems including, compensation which the public wants that are not in accordance with the rules used, to the difficulty of reaching consensus between land owners and government when establishing the compensation value.*

*The purpose of this research is to determine the implementation of Land Procurement for Development Policy Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in the district of Majalengka Kertajati, to determine the factors that hinder the achievement of policy implementation, and to know the effort in overcoming obstacles in the implementation of the policy.*

*This research refers to the theory of George C. Edward III, which proposed four factors were instrumental in achieving a successful implementation. Factors that influence the success or failure of policy implementation that is factor of communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure.*

*The method used is qualitative method with descriptive translation. To obtain information, the authors conducted observations, interviews with informants and literature review of the documents the implementation of existing land procurement. The technique used to analyze the data is by comparing observational data with data from in-depth interviews with informants, and compare the results of interviews with the contents of a document related.*

*The result of this research, the implementation of the policy procurement of the land for development BIJB in the District Kertajati Majalengka declared failed, even though the government has been carrying out the procurement process and the land in accordance with the flow or phases of which are on the effect. The obstacles in the implementation of the policy procurement the land comes from the government is less attention to the external factors (environment outside the policy) in practice, such as the government is still regards to the public as an object was not as the subject of development and not maximal government in socializing with the advanced communication should be a major concern government from the beginning, causing a lack of community participation in supporting the government's development direction. While the efforts of the new government to the people just approach to the problems at the time it happened, and have not overcome until the roots so that the efforts considered not maximal.*

***Keywords: Policy Implementation, Land Procurement***